



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA

Jalan Menteri Supeno No. 10, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57139



RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
Tahun 2019



PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. DIKPLHD ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan benar mengenai data dan informasi isu prioritas lingkungan Kota Surakarta serta pengelolaannya. Saya menyatakan bahwa DIKPLHD Kota Surakarta Tahun 2019 memuat isu prioritas daerah yang didasarkan pada proses partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Surakarta yang meliputi unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat. Isu – isu lingkungan hidup di Kota Surakarta Tahun 2019 berdasarkan prioritasnya meliputi: (1) tata guna lahan, (2) kualitas air dan udara, (3) sampah, (4) kemacetan lalu lintas, dan (5) banjir genangan. Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, November 2019

WALIKOTA SURAKARTA

FX. HADI RUDYATMO



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan dari penulisan DIKPLHD ini adalah untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan dan inisiatif yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam dan perbaikan tata kelola lingkungan. Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim DIKPLHD dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah mendukung penyusunan DIKPLHD Kota Surakarta Tahun 2019. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan Dokumen ini. Semoga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Surakarta, November 2019

WALIKOTA SURAKARTA

FX. HADI RUDYATMO

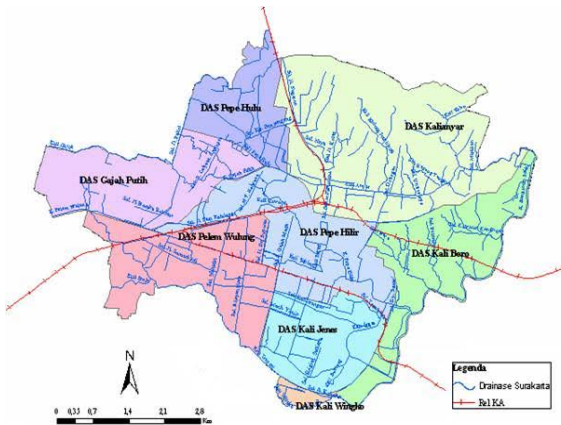
DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1 PENDAHULUAN	1
2 ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSE (DPSIR) ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA	3
3 ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP	13
4 INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	14
5 PENUTUP	15

Ringkasan Eksekutif

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

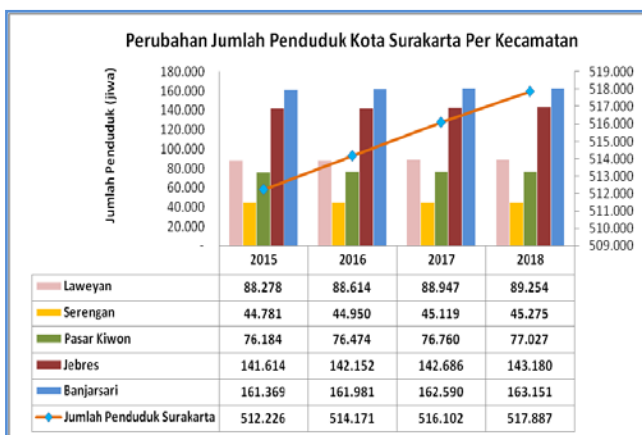
1. PENDAHULUAN



Kota Surakarta secara astronomis terletak pada $110^{\circ}45'15''$ - $110^{\circ}45'35''$ bujur timur dan antara $7^{\circ}36'$ - $7^{\circ}56'$ lintang selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan

sebesar 44.04 Km^2 ($\pm 0,13\%$) luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

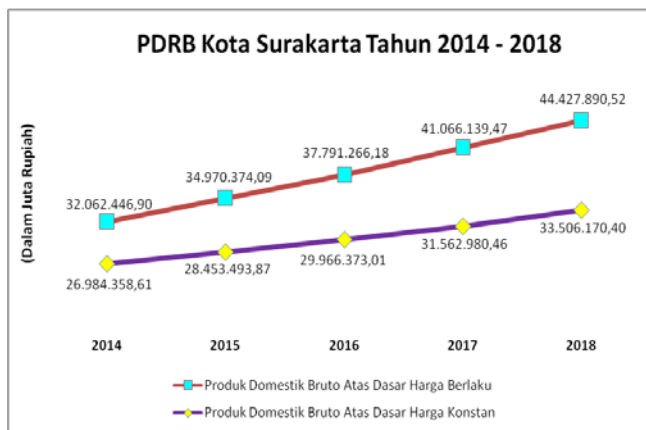
Posisi strategis Kota Surakarta menjadikan kota ini sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yaitu wilayah ekonomi Segitiga Joglosemar (Yogyakarta – Solo – Semarang). Selain itu juga menjadi pusat pertumbuhann perekonomian, di wilayah eks-karesiden Kota Surakarta, yang meliputi Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Klaten atau dikenal dengan sebutan Subosukowonosraten.



Jumlah penduduk Kota Surakarta selalu mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2018 berdasarkan data BPS berjumlah 517.887 jiwa, dengan luas wilayah yang relatif kecil, menjadi kota

dengan kepadatan penduduk yang tinggi sebesar 11.759 jiwa/km^2 .

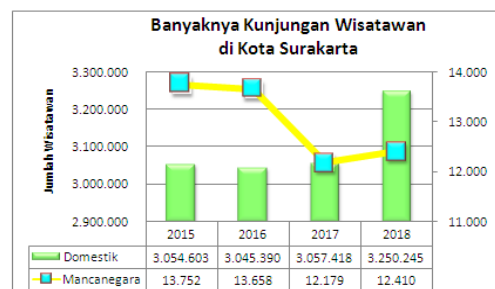
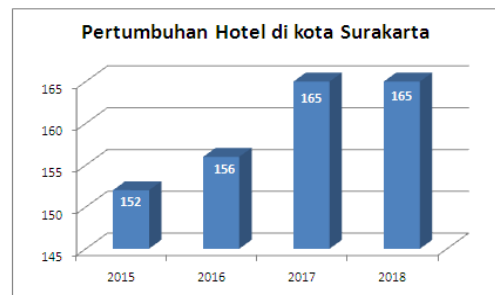
Kondisi fisik dan geografis Kota Surakarta Wilayah Surakarta memiliki topografi relatif datar dengan 80,3% dengan kemiringan 0-2%, sedangkan sisanya (19,7%) merupakan lahan bergelombang dengan gradien kemiringan 2-15% (Bapedda, 2017). Kota Surakarta beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar antara 22.7 °C - 28,8 °C, Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 60 persen - 88 persen.



Pada tahun 2018 Kota Surakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75 % dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,70 %. Sektor Konstruksi memberikan sumbangan tertinggi sebesar 27,14 %

(meningkat dari 26,71 % di tahun 2017).

Pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12,11% (dibanding tahun 2017 sebesar 10,56%), Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi di kota Surakarta sangat pesat. Peningkatan PDRB di Kota Surakarta secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap selain terpenuhinya kebutuhan primer, juga terhadap kebutuhan sekunder ataupun tersier. Efek peningkatan kebutuhan sekunder/tersier masyarakat sebagai contoh adalah meningkatnya jumlah motor ataupun mobil, meningkatnya



kebutuhan akan gaya hidup (*life style*) dengan semakin banyaknya mall / pusat perbelanjaan, meningkatnya kebutuhan hiburan (*entertainment*), hotel, wisata dan wisata kuliner. Hal tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan pada sisi kebutuhan alih fungsi lahan, kemacetan dan timbulan sampah.

Aktivitas perekonomian yang dominan di Surakarta adalah perdagangan, jasa dan pariwisata yang diselaraskan dengan cita-cita Surakarta menjadi kota MICE (*meeting, incentives, convention and exhibition*) dan kota budaya. Hal tersebut memicu peningkatan pembangunan, investasi, pendatang dan pengunjung. Kondisi ini tentunya akan berdampak negatif bagi kota Surakarta, yaitu tekanan lingkungan yang diterima akan semakin besar.

Untuk membantu perumusan kebijakan terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kota Surakarta, diperlukan suatu sarana penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan disusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2019. Proses penyusunan Dokumen IKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas dengan melibatkan masyarakat melalui FGD, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dengan pendekatan *Driving force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR).

2. ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSE* (DPSIR) ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA

Adapun analisis *Driving force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR) untuk masing – masing isu prioritas adalah sebagai berikut:

A. Tata Guna Lahan

- **Faktor Pendorong (*Driving force*)** terhadap masalah perubahan alih fungsi tata guna lahan di Kota Surakarta antara lain: 1). Peningkatan Penduduk dan Prilaku Masyarakat. 2). Perkembangan kota Surakarta Sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan CBD (*Central Busines District*) Andalan Joglosemar dan Subosukowonosraten, Kota MICE dan Kota Budaya
- **Tekanan (*Pressure*)** terhadap masalah perubahan alih fungsi tata guna lahan yaitu: 1). Semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan kurangnya kesadaran terhadap hukum tata guna lahan. 2). Strategi dan kebijakan pengembangan struktur ruang yang berdampak pada peningkatan investasi dan pembangunan.
- **Kondisi (*State*)**. 1). Terdapat adanya kawasan bernilai sejarah tinggi (Cagar Budaya) yang harus dilindungi, 2). Penurunan luas lahan pertanian, tanah kosong, dan lahan kering, 3). Penurunan luas lahan pertanian, tanah kosong, dan lahan kering, 4). Luas RTH Kota Surakarta tidak mengalami perubahan signifikan
- **Dampak (*Impact*)** terhadap masalah perubahan alih fungsi tata guna lahan yaitu: 1). Menurunnya luas lahan pertanian sehingga menyebabkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian lokal. 2). Mengancam keberadaan kawasan cagar budaya. 3). Adanya Kawasan Kumuh.
- **Respon (*Response*)**: 1). Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni dan mengurangi kawasan pemukiman kumuh melalui Keputusan Walikota Surakarta No. 413.21/38.3/1/2016, 2). Penentuan zonasi kawasan Kota Surakarta melalui Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta. Penataan dilakukan agar sesuai dengan peruntukan seperti: penataan pemukiman bantaran sungai dan ruang milik jalan; penataan jalur pedestrian; penataan

taman kota; penataan pasar tradisional; penghijauan dan pembangunan RTH.

B. Kualitas Air

- **Faktor Pendorong (*Driving force*)** terhadap masalah penurunan kualitas air di Kota Surakarta antara lain: 1). Peningkatan penduduk dan perilaku masyarakat. 2). Strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Adanya program MICE Kota Surakarta meningkatkan investor di Kota Surakarta. 3). Lokasi dan posisi Kota Surakarta yang sangat dipengaruhi oleh daerah sekitarnya.
- **Tekanan (*Pressure*)**: 1). Adanya peningkatan penduduk dan permukiman menyebabkan peningkatan volume air limbah domestik. 2). Peningkatan pembangunan sarana-prasarana penunjang perekonomian menyebabkan timbulan air limbah yang semakin besar. 3). Kesulitan ketersediaan lahan dalam pembangunan IPAL komunal, 4). Selain itu, tidak adanya kebijakan perumahan yang ketat untuk menyediakan IPAL domestik. 5). Banyaknya pengunjung dan pendatang dari luar Kota Surakarta.
- **Kondisi (*State*)**. Pada Tahun 2018, DLH Kota Surakarta melakukan pemantauan beberapa sumber pencemar air dan juga air sungai, dengan hasil : 1). Pemantauan Air Limbah Pabrik Tahu/Tempe menunjukkan parameter BOD, COD, dan TSS jauh melampaui baku mutu. 2). Pemantauan Air Limbah Pabrik Batik menunjukkan parameter BOD, COD, minyak-lemak, dan TSS jauh melampaui baku mutu. 3). Pemantauan Air Limbah Rumah Sakit menunjukkan parameter TSS melampaui baku mutu. 4). Pemantauan Air Limbah KSM Sanimas parameter TSS melampaui baku mutu. 5). Pemantauan kualitas air sungai menunjukkan bahwa parameter kualitas air sungai di Kota Surakarta masih banyak yang melampaui baku mutu. Beberapa parameter yang melampaui baku mutu di beberapa sungai di Kota Surakarta antara lain fecal coliform, total

coliform, Detergen, klor bebas, phosphate, DO, BOD, dan COD. Sebagian besar sungai di Kota Surakarta menunjukkan status tercemar.

- **Dampak (*Impact*)** 1). Penurunan atau masih buruknya kualitas air, terutama parameter Fecal dan total coliform berdampak pada kesehatan masyarakat terutama penyakit diare dan kulit 2). Penurunan volume Sumber Air Bersih/air baku.
- **Respon (*Response*)**: 1). Pelayanan pengelolaan pengolahan limbah domestik rumah tangga melalui sistem *on-site dan off-site sanitation*, 2). Melakukan Pemantauan kualitas Air sungai, 3). Peningkatan kualitas ODF (*open defecation free*), 4). Upaya pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang – Undang Lingkungan Hidup.

C. Kualitas Udara

- **Faktor Pendorong (*Driving force*)** terhadap masalah penurunan kualitas udara di Kota Surakarta antara lain: 1). Peningkatan penduduk dan perilaku masyarakat. 2). Lokasi dan posisi Kota Surakarta terdapat jalan nasional dan provinsi dengan jalur lintas provinsi dan kabupaten/kota. 3). Kemudahan pembelian kendaraan bermotor. 4). Belum optimalnya strategi dan kebijakan pemerintah terkait transportasi umum. 5). Peningkatan usaha, salah satu usaha transportasi yang saat ini sangat populer adalah adanya ojek online (OJOL) berkontribusi terhadap peningkatan kendaraan bermotor.
- **Tekanan (*Pressure*)**. Tekanan (*pressure*) terhadap masalah pencemaran udara di Kota Surakarta secara umum dipengaruhi oleh: 1). Peningkatan volume kendaraan bermotor yang berada dan melintasi Kota Surakarta. 2) Penurunan jumlah vegetasi akibat perubahan tata guna lahan dan penertiban/pembangunan.

Penurunan vegetasi ini dapat menyebabkan berkurangnya penyerap polutan udara.

- **Kondisi (*State*)**. Pengawasan dan monitoring dilakukan pada kawasan padat transportasi (*Roadside*), Industri/ Agro Industri, kawasan permukiman dan kawasan perkantoran/ Komersial di 14 titik lokasi sampling yang tersebar di 5 kecamatan. Hasil pemantauan menunjukkan: 1) Konsentrasi SO₂ tertinggi terletak di kawasan yang padat transportasi sedangkan terendah terletak di kawasan permukiman. Konsentrasi SO₂ diseluruh lokasi pemantauan masih memenuhi baku mutu, 2). Konsentrasi NO₂ diseluruh lokasi pemantauan masih memenuhi baku mutu. Berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi NO₂ tertinggi terletak di kawasan yang padat transportasi sedangkan terendah terletak di kawasan permukiman. 3). Indeks Kualitas udara (IKU) meningkat
- **Dampak (*Impact*)** : 1). Peningkatan suhu rata – rata udara, 2). Dampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Terlalu banyak menghirup gas polutan udara seperti CO, SO₂, NO₂, TSP, Pb akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan pusing.
- **Respon (*Response*)** : 1). Pemantauan kualitas udara ambien maupun inventarisasi emisi. 2). Pengawasan dan uji kualitas udara pada berbagai aktivitas. 3). Penyediaan transportasi massal yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas maupun jangkauan layanan. 4). Melakukan penghijauan dan penambahan RTH di beberapa lokasi di Kota Surakarta antara lain dibantaran Sungai Bengawan solo, alun-alun, Hutan Kota, Ring road, dll.

D. Resiko Bencana

- **Faktor Pendorong (*Driving force*)** terhadap masalah resiko bencana di Kota Surakarta antara lain: 1). Lokasi Kota Surakarta yang berada dicekungan yang berpotensi bencana banjir genangan maupun luapan, 2). Kepadatan populasi yang ironisnya berbanding

terbalik dengan kondisi persepsi lingkungan. Persepsi tersebut didorong oleh budaya dan kebutuhan sehingga muncul kecenderungan mengabaikan lingkungan, 3). Adanya faktor kemiskinan mendorong sebagian masyarakat tinggal di bantaran sungai.

- **Tekanan (*Pressure*):** 1). Faktor alam, Perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan musim dan intensitas hujan sehingga berdampak pada kapasitas sarana pengendali dampaknya. 2). Faktor manusia (antropogenik) dan Peningkatan jumlah penduduk. 3). Fasilitas pengendali dampak seperti drainase yang sudah menua dan mengalami penurunan fungsi.
- **Kondisi (*State*):** Pada tahun 2018 tidak dijumpai adanya Bencana banjir, hal ini dikarenakan pemerintah kota Surakarta telah melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) akan adanya bencana banjir, baik banjir genangan maupun luapan. Adapun kejadian bencana kebakaran pemukiman penduduk pada tahun 2018 menunjukkan jumlah terbesar adalah kebakaran rumah penduduk disebabkan karena korsleting listrik dan kompor gas meledak (BPS, 2019).
- **Dampak (*Impact*):** Pada tahun 2018 tidak terdapat laporan adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat bencana. Akan tetapi, walaupun tidak menimbulkan korban jiwa dengan adanya bencana dapat mengakibatkan terganggunya beberapa aktifitas kegiatan masyarakat diantaranya: pendidikan, perkantoran, perdagangan sosial dan lainnya
- **Respon (*Response*):** 1) Pemerintah Surakarta telah merilis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana daerah. 2). Pemerintah telah menetapkan kawasan rawan banjir luapan khususnya pada bantaran Bengawan Solo yang

tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, khususnya pada bantaran Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya. 3). Pemerintah telah berinisiatif menambah kawasan resapan air dengan biopori, sumur resapan, normalisasi bantaran sungai, dan normalisasi ruang milik jalan dari bangunan/kios menjadi area resapan. 4). Pembangunan Bendung Karet Tirtonadi sebagai penahan banjir. 5). Pemerintah mulai merestorasi fasilitas drainase Kota Surakarta dan memperbaiki secara fisik kondisi beberapa sungai utama.

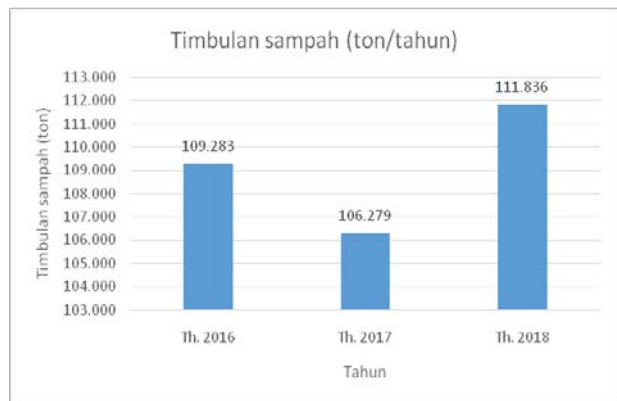
E. Masalah Perkotaan (Sampah dan Kemacetan Lalu Lintas)

E. 1. Sampah

- **Faktor Pendorong (*Driving force*)** terhadap masalah sampah di Kota Surakarta antara lain: 1). Pertumbuhan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat. 2). Kebijakan pemerintah Kota Surakarta menjadikan salah satu kota pusat MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) mengakibatkan banyak pendatang dan pengunjung. 3). Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terkenal akan kulinernya dengan pola hidup konsumtif yang cukup tinggi.
- **Tekanan (*Pressure*)**: 1). Peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan di Kota Surakarta dengan segala aktifitasnya menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. 2). Belum optimalnya pengelolaan sampah baik dari sumbernya maupun di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus – menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Selain itu, banyaknya PKL juga memberikan sumbangan terhadap timbulan sampah di Kota Surakarta.

- **Kondisi (State):** 1).

Keseluruhan pengelolaan sampah padat di Surakarta terpusat pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Pengolahan sampah pada TPA Putri Cempo dilakukan dengan



metode open dumping dan sudah overload. 2). Peningkatan sampah per tahun di Kota Surakarta seperti yang terlihat pada gambar disamping. berdasarkan data timbulan sampah dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,23%.

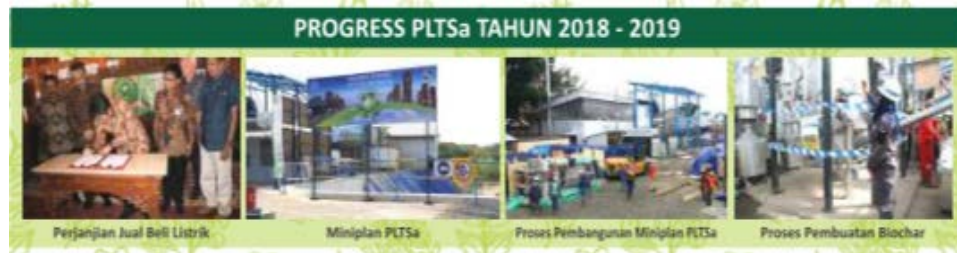
- **Dampak (Impact):** Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, keindahan lingkungan dan potensi terjadinya banjir akibat pembuangan sampah ke drainase/sungai, ledakan gas metan atau kebakaran, pencemaran udara akibat pembakaran dan timbulnya bau tidak sedap.

- **Respon (Response):** 1).

Sosialisasi persampahan dan membuat skema pengelolaan sampah oleh DLH; 2). Penyediaan sarana dan prasarana persampahan; 3).



Pelaksanaan 3R sampah melalui Bank sampah; 4). grebeg sampah, 5). sekolah adiwiyata, 6). Program Zero TPS/ 7). Pengurangan TPS menjadi RTH atau taman; 8). Pelayanan Persampahan berbasis komunal; 9). Pembenahan dan pengembangan TPA Putri Cempo untuk mendukung pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)



E.2. Kemacetan Lalu Lintas

- **Faktor Pendorong (*Driving force*)** terhadap masalah kemacetan di Kota Surakarta antara lain: 1). Laju Pertumbuhan penduduk dan perilaku masyarakat 2). Peningkatan pendapatan masyarakat. 3). Kemudahan pembelian kendaraan bermotor. 4). Belum optimalnya strategi dan kebijakan pemerintah terkait transportasi umum.



umber: Disub Kota Surakarta, 2018

- **Tekanan (*Pressure*)** : Peningkatan Jumlah Kendaraan bermotor baik mobil, motor, truk baik umum maupun pribadi menyebabkan naiknya tingkat kemacetan. Selain itu dipicu juga banyaknya kendaraan yang masuk dan keluar di kota solo dari luar daerah. Adanya penyalahgunaan ruang milik jalan dan parkir liar dipinggir jalan memperparah kemacetan lalu lintas terutama untuk jalan yang sempit.
- **Kondisi (*State*)**. 1). Kemacetan Kota Surakarta masih bersifat temporary pada waktu tertentu dengan 20 lokasi berpotensi kemacetan, 2). Kondisi Jalan raya Kota Surakarta sudah tidak bisa



Keterangan : *Stasiun di Kota Surakarta
1. Stasiun Purwosari 2. Stasiun Jebres
3. Stasiun Balapan 4. Stasiun Solo Kota
(Nomor dengan warna biru)
*Persimpangan jalan dan rel kereta api yang sering mengalami kemacetan
A. Perlintasan rel Purwosari D. Perlintasan rel Gilangan (Balapan)
B. Perlintasan rel Manahan E. Perlintasan rel Jebres
C. Perlintasan rel Pasar Nongko F. Perlintasan rel Palang Joglo
(Huruf dengan warna merah)

bertambah lagi, Selain itu juga terdapat 6 (enam) jalan raya yang melalui persimpangan palang pintu kereta, sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat karena adanya kereta yang melintas.

- **Dampak (*Impact*):** Adanya kemacetan akan menyebabkan peningkatan emisi gas polutan udara dari kendaraan bermotor dan menyebabkan peningkatan suhu udara.
- **Respon (*Response*).** Upaya untuk meminimalisir atau menanggulangi masalah kemacetan di Kota Surakarta yaitu : Rekayasa lalulintas misalnya jalan satu arah; Jalur *Contraflow*, Perbaikan kualitas jalan dan pelebaran jalan; Normalisasi ruang milik jalan dari bangunan dan kios; Pemerintah Kota Surakarta telah menyediakan Sarana transportasi publik yang mudah, murah dan nyaman yaitu Bus Batik Solo Trans (BST); Setelah *Flyover* Manahan, Pemerintah Surakarta saat ini akan melakukan pembangunan *Flyover* purwosari; Pemerintah Kota Surakarta juga menerapkan sanksi gembok roda dan denda tegas bagi para pengguna mobil yang parkir sembarangan dan bukan pada tempatnya.

F. Tata Kelola

- **Faktor Pendorong (*Driving force*)** terhadap masalah tata kelola lingkungan hidup di kota Surakarta antara lain: 1). Jumlah personil. 2). Kompetensi personil. 3). Kerjasama instansi. 4). Jumlah anggaran.
- **Tekanan (*Pressure*):** 1). Kurangnya jumlah personil. 2). Kompetensi personil yang tidak sesuai bidangnya. 3). Kerjasama antar instansi yang kurang baik. 4). Terbatasnya anggaran.
- **Kondisi (*State*):** Jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup Kota Surakarta berjumlah 252 orang, Pendapatan asli daerah Tahun 2018 mengalami penurunan 0,46% dibandingkan Tahun 2017 dan jumlah anggaran terkait lingkungan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 25,07% dari Tahun 2017.

- **Dampak (*Impact*)** : 1). Dampak positif terhadap masalah tata kelola lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Surakarta, 2). Dampak negatifnya adalah dengan adanya masalah dalam tata kelola lingkungan hidup akan menimbulkan aduan dari masyarakat ke pemkot maupun DLH. Pada Tahun 2018, terdapat 19 pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- **Respon (*Response*)**, antara lain: 1). Peningkatan kompetensi personil pengelola lingkungan hidup dengan cara memberikan beasiswa sekolah dan diklat. 2). Penempatan personil sesuai bidang dan kompetensinya. 3). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup

3. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu prioritas lingkungan hidup didasari pada permasalahan lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Penetapan isu prioritas didasarkan pada analisis DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response*) dan proses partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada hari Senin, 16 September 2019 dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi dan LSM lingkungan hidup.



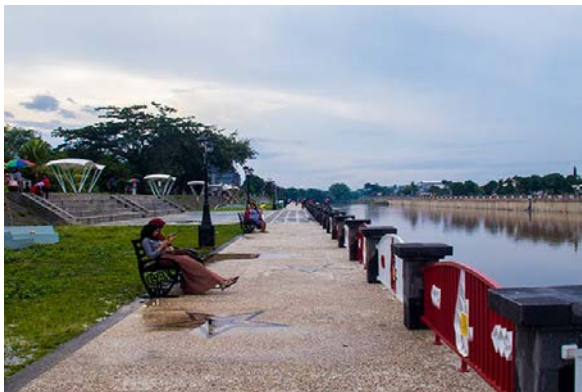
Dokumentasi FGD penentuan isu prioritas lingkungan hidup
Sumber : DLH Kota Surakarta, 2019

Berdasarkan hasil analisis DPSIR dan FGD, diperoleh urutan isu prioritas:

- 1) Tata Guna Lahan
- 2) Kualitas Air dan Udara
- 3) Sampah
- 4) Kemacetan Lalu lintas
- 5) Banjir Genangan

Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan akan diintegrasikan kedalam analisis *Driving force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR), untuk kemudian dilakukan rencana tindak, serta inisiatif dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup melalui program kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.

4. INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



Inovasi daerah Selain pembangunan infrastruktur fisik, juga dilakukan pembagunan non-fisik yaitu melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup. antara lain: KOTAKU, Penataan Taman dan Pedestrian, Penataan Pasar Tradisional, Pengolahan limbah domestik baik on-site maupun off-site, SANIMAS dan ODF (*open defecation free*), Prokasih, Normalisasi bantaran sungai, pembentukan Pokja Sungai, Sosialisasi Padat Karya, Proklam, Zero TPS, PLTSa, Grebeg Sampah, Kegiatan Bank sampah dan 3R, Program Sekolah Adiwiyata, sekolah ramah anak.



Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/Komunitas Lingkungan seperti: Gerakan bulan menanam, pembuatan lubang resapan biopori, sosialisasi terkait lingkungan hidup, grebeg sampah, Peringatan Hari

Lingkungan Hidup Sedunia, Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Peringatan Hari Bumi, Peringatan Hari Air Sedunia, Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Peringatan Earth Hour.

Adanya upaya dan inovasi yang telah dilakukan, Kota Surakarta mendapatkan beberapa penghargaan tingkat nasional pada Tahun 2019 antara lain: penghargaan Proklamasi, Hemat energi, EPMK, STBM Awards,



Kota Layak Anak, Kelurahan terbaik se Indonesia, Innovative Government Awards, Pembinaan Fórum Anak, Kelembagaan UPTD PPA terbaik, Pelopor ruang bermain, Sekolah ramah anak terbaik tingkat Para-sekolah

5. PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kota Surakarta merupakan tanggung jawab bersama, kerjasama lintas sektoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surakarta, Perguruan Tinggi, Swasta/Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Lingkungan Hidup Surakarta serta lapisan masyarakat. Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efisien dan efektif. Dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2019 diharapkan dapat mendukung proses dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta.